

SKRIPSI

**PEMODELAN *SPATIAL MULTI-CRITERIA EVALUATION* (SMCE)
DALAM PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI BERBASIS
KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN BARRU**

Disusun dan diajukan oleh

BIJAK ANGGUN PIRANTI SEMBIRING

D101 19 1069



DEPARTEMEN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PEMODELAN *SPATIAL MULTI-CRITERIA EVALUATION* (SMCE) DALAM PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN BARRU

Disusun dan diajukan oleh

Bijak Anggun Piranti Sembiring
D101191069

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Pada tanggal **11 Desember 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Eng Abdul Rachman Rasyid, S.T., M.Si
NIP 19741006 200812 1 002

Pembimbing Pendamping,



Isfa Sastrawati, S.T., M.T
NIP 19741220 200501 2 001

Ketua Program Studi,



Dr. Eng Abdul Rachman Rasyid, S.T., M.Si
NIP 19741006 200812 1 002



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bijak Anggun Piranti Sembiring
NIM : D101191069
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Pemodelan *Spatial Multi Criteria Evaluation* (SMCE) dalam Pengembangan Sentra Industri Berbasis Komoditas Unggulan Subsektor Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Barru

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

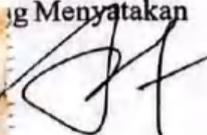
Semua informasi yang ditulis dalam skripsi yang berasal dari penulis lain telah diberi penghargaan, yakni dengan mengutip sumber dan tahun penerbitnya. Oleh karena itu, semua tulisan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Apabila ada pihak manapun yang merasa ada kesamaan judul atau hasil temuan dalam skripsi ini, maka penulis siap untuk diklarifikasi dan mempertanggungjawabkan segala resiko.

Segala data dan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan skripsi, yang akan dipublikasi oleh penulis di masa depan harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Gowa, 11 Desember 2023



Yang Menyatakan

(Bijak Anggun Piranti Sembiring)

ABSTRAK

BIJAK ANGGUN PIRANTI SEMBIRING. *Pemodelan Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) dalam Pengembangan Sentra Industri Berbasis Komoditas Unggulan Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Barru* (dibimbing oleh Abdul Rachman Rasyid dan Isfa Sastrawati)

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Barru sebesar 35,02% dengan laju pertumbuhan 4,51% di tahun 2022, sehingga daerah memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap sektor. Penggunaan lahan produksi sektor pertanian seluas 47.830,75 Ha atau sebesar 40% dari total luas wilayah Kabupaten Barru. Dilain sisi daya saing di tiap wilayah juga meningkat sehingga penentuan sentra industri dapat menjadi upaya peningkatan kualitas sektor pertanian di Kabupaten Barru. Tujuan penelitian ini: 1) memetakan potensi komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan; 2) mengevaluasi kesesuaian lokasi sentra industri pertanian tanaman pangan dan perkebunan; 3) menentukan lokasi prioritas dalam pengembangan sentra industri. Penelitian dilakukan pada Mei 2023 sampai Juli 2023 berlokasi di Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik analisis LQ dan *shift share* dalam penentuan komoditas unggulan, AHP untuk menentukan kriteria paling berpengaruh dalam penentuan sentra industri dan SMCE untuk menentukan kesesuaian wilayah terhadap sentra industri menggunakan 8 variabel yaitu: kondisi fisik dasar; aksesibilitas; tenaga kerja; bahan baku; sarana dan prasarana pendukung; aglomerasi; kelembagaan dan; ketersediaan lahan. Hasil penelitian meliputi: 1) komoditas unggulan adalah padi, kakao, jambu mete dan kelapa; 2) kriteria yang paling berpengaruh terhadap kesesuaian sentra industri adalah ketersediaan bahan baku (21,8%), ketersediaan lahan (14,6%) dan sarana prasarana pendukung (13,7%). Lokasi kesesuaian sentra industri tanaman pangan terdapat pada Kecamatan Tanete Rilau, Soppeng Riaja, Balusu dan Mallusetasi dengan persentase 76%-100%, sedangkan untuk perkebunan terdapat pada Kecamatan Tanete Riaja, Tanete Rilau, Soppeng Riaja, dan Mallusetasi dengan persentase 76%-100%; 3) lokasi prioritas pengembangan sentra industri adalah: a) komoditas padi di Kecamatan Balusu; b) komoditas kakao di Kecamatan Balusu; c) komoditas jambu mete di Kecamatan Tanete Rilau; d) komoditas kelapa di Kecamatan Tanete Riaja.

Kata Kunci: SMCE, Sentra Industri, Komoditas Unggulan, AHP, Kabupaten Barru



ABSTRACT

BIJAK ANGGUN PIRANTI SEMBIRING. *Modeling Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) in The Development of Industrial Centers Based on Leading Commodities of Agricultural Food Crops and Plantations in Barru Regency* (supervised by Abdul Rachman Rasyid and Isfa Sastrawati)

The agricultural sector is the largest contributor to Barru Regency's PDRB at 35.02% with a growth rate of 4.51% in 2022, so the region has high economic dependence on the sector. The use of production land in the agricultural sector covers an area of 47,830.75 Ha or 40% of the total area of Barru Regency. On the other hand, the competitiveness of each region has also increased so that determining industrial centers can be an effort to improve the quality of the agricultural sector in Barru Regency. The objectives of this research are: 1) to map the potential of leading agricultural commodities for food crops and plantations; 2) evaluate the suitability of the location of food crop and plantation agricultural industry centers; 3) determine priority locations in the development of industrial centers. The research was conducted from May 2023 to July 2023 located in Barru Regency. This research uses secondary data with LQ and *shift share* analysis in determining leading commodities, AHP to determine the most influential criteria in determining industrial centers and SMCE to determine the suitability of areas for industrial centers uses 8 variables namely: basic physical conditions; accessibility; labor; raw material; supporting facilities and infrastructure; agglomeration; institutional and; land availability. The research results include: 1) leading commodities are rice, cocoa, cashew and coconut; 2) The criteria that most influence the suitability of industrial centers are the availability of raw materials (21.8%), land availability (14.6%) and supporting infrastructure (13.7%). Suitable locations for food crop industry centers are in the Tanete Rilau, Soppeng Riaja, Balusu and Mallusetasi Districts with a percentage of 76% -100%, while for plantations they are in the Tanete Riaja, Tanete Rilau, Soppeng Riaja and Mallusetasi Districts with a percentage of 76% -100% ; 3) priority locations for developing industrial centers are: a) rice commodities in Balusu District; b) cocoa commodities in Balusu District; c) cashew commodity in Tanete Rilau District; d) coconut commodities in Tanete Riaja District.

Keywords: SMCE, Industrial Center, Leading Commodities, AHP, Barru Regency



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI SIMBOL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Ruang Lingkup.....	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengembangan Wilayah.....	5
2.2. Industri	6
2.2.1. Sentra Industri	8
2.2.2. Faktor Penentuan Lokasi Sentra Industri.....	9
2.3. Komoditas Unggulan.....	12
2.4. Pertanian.....	13
2.4.1. Tanaman Pangan dan Perkebunan.....	15
i Basis Ekonomi	16
. Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).....	17
. Analisis <i>Shift Share</i>	17



2.6. Teori Lokasi Industri	18
2.7. <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	19
2.8. <i>Review</i> Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru 2011-2031 (Pertanian, Perkebunan dan Industri)	23
2.9. Visi Misi Kabupaten Barru	27
2.10. Studi Penelitian Terdahulu	28
2.11. Kerangka Konsep	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	33
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
3.3. Jenis dan Kebutuhan Data	35
3.5. Variabel Penelitian	35
3.6. Teknik Penentuan Responden	38
3.7. Teknik Pengumpulan Data	38
3.8. Teknik Analisis Data	39
3.9. Kerangka Penelitian	44
3.10. Definisi Operasional	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum	48
4.1.1. Kondisi Geografis dan Administratif	48
4.1.2. Kondisi Fisik	50
4.1.3. Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan	60
4.1.4. Kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	62
4.1.5. Produksi Sektor Pertanian	64
4.1.6. Kondisi Transportasi	67
4.1.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung, Industri Sejenis dan Kelembagaan	74
4.1.8. Analisis Komoditas Unggulan Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Barru	76



4.2.1. Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Komoditas Unggulan Subsektor Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Barru.....	78
4.2.2. Analisis <i>Shift Share</i> Komoditas Unggulan Subsektor Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Barru.....	82
4.2.3. Kompilasi Hasil Analisis LQ dan <i>Shift Share</i>	96
4.3. Kesesuaian Lahan Sentra Industri dalam Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Barru	114
4.3.1. Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesesuaian Sentra Industri Sektor Pertanian di Kabupaten Barru	115
4.3.2. <i>Spatial Multi-Criteria Evaluation</i> (SMCE).....	123
4.3.3. Penggabungan Kriteria	141
4.4. Lokasi Prioritas Pengembangan Sentra Industri Komoditas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Barru.....	145
4.4.1. Prioritas Pengembangan Sentra Industri Pertanian Tanaman Pangan.....	145
4.4.2. Prioritas Pengembangan Sentra Industri Perkebunan.....	147
4.4.3. Kompilasi Lokasi Prioritas Pengembangan Sentra Industri Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Barru	153
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	160
5.2. Saran.....	161
 DAFTAR PUSTAKA	162
LAMPIRAN	168
CURRICULUM VITAE	184



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Segitiga lokasi	19
Gambar 2	Model struktur AHP 2 level dengan N kriteria dan M alternatif.....	21
Gambar 3	Kerangka konsep	32
Gambar 4	Peta lokasi penelitian.....	34
Gambar 5	Penentuan bobot AHP	42
Gambar 6	Kerangka penelitian.....	44
Gambar 7	Tahapan analisis data.....	45
Gambar 8	Peta administrasi Kabupaten Barru	49
Gambar 9	Peta kemiringan lereng Kabupaten Barru	55
Gambar 10	Peta jenis tanah Kabupaten Barru	56
Gambar 11	Peta rawan bencana Kabupaten Barru.....	57
Gambar 12	Peta curah hujan Kabupaten Barru.....	58
Gambar 13	Peta penggunaan lahan Kabupaten Barru.....	59
Gambar 14	Grafik pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barru tahun 2018-2022.....	61
Gambar 15	Grafik persentase PDRB atas harga berlaku Kabupaten Barru tahun 2022	64
Gambar 16	Kondisi jalan di Kabupaten Barru	68
Gambar 17	Kondisi terminal di Kabupaten Barru	68
Gambar 18	Transportasi darat (a) Stasiun Kereta Api Tanete Rilau (b) Stasiun Kereta Api Garongkong.....	69
Gambar 19	Peta jaringan jalan dan fasilitas pendukung lalu lintas di Kabupaten Barru.....	70
Gambar 20	Peta jaringan rel kereta api dan stasiun kereta api di Kabupaten Barru.....	71
Gambar 21	Kondisi pelabuhan di Kabupaten Barru	72
	22 Peta sebaran pelabuhan di Kabupaten Barru.....	73
	23 Sarana dan prasarana (a) saluran air bersih (b) jaringan kelistrikan (c) BTS di Kabupaten Barru.....	74



Gambar 24	Kondisi pasar di Kabupaten Barru	76
Gambar 25	Peta potensi subsektor tanaman pangan komoditas padi Kabupaten Barru.....	99
Gambar 26	Peta potensi subsektor tanaman pangan komoditas jagung Kabupaten Barru.....	100
Gambar 27	Peta potensi subsektor tanaman pangan komoditas kacang tanah Kabupaten Barru	101
Gambar 28	Peta potensi subsektor tanaman pangan komoditas kacang hijau Kabupaten Barru.....	102
Gambar 29	Peta potensi subsektor tanaman pangan komoditas ubi jalar Kabupaten Barru.....	103
Gambar 30	Peta potensi subsektor tanaman pangan komoditas ubi kayu Kabupaten Barru.....	104
Gambar 31	Peta komoditas unggulan pertanian tanaman pangan Kabupaten Barru.....	105
Gambar 32	Peta potensi subsektor perkebunan komoditas kakao Kabupaten Barru.....	108
Gambar 33	Peta potensi subsektor perkebunan komoditas jambu mete Kabupaten Barru.....	109
Gambar 34	Peta potensi subsektor perkebunan komoditas cengkeh Kabupaten Barru.....	110
Gambar 35	Peta potensi subsektor perkebunan komoditas kelapa Kabupaten Barru.....	111
Gambar 36	Peta potensi subsektor perkebunan komoditas kemiri Kabupaten Barru.....	112
Gambar 37	Peta komoditas unggulan perkebunan Kabupaten Barru	113
Gambar 38	Nilai responden pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru.....	115
Gambar 39	Nilai responden pihak Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru.....	116
Gambar 40	Nilai responden pihak Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Barru	117



Gambar 41	Nilai responden pihak Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Barru	117
Gambar 42	Nilai responden pihak Akademisi Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Hasanuddin (1)	118
Gambar 43	Nilai responden pihak Akademisi Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Hasanuddin (2)	118
Gambar 44	Nilai responden pihak Akademisi Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Hasanuddin (3)	119
Gambar 45	Nilai responden pihak Akademisi Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sulawesi Barat (4)	119
Gambar 46	Nilai responden pihak Akademisi Dosen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sulawesi Barat (5)	120
Gambar 47	Nilai responden pihak Akademisi Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin (1)	120
Gambar 48	Nilai responden pihak Akademisi Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin (2)	121
Gambar 49	Nilai responden pihak Akademisi Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin (3)	121
Gambar 50	Nilai responden pihak swasta	122
Gambar 51	Nilai kombinasi responden	122
Gambar 52	Peta skoring kemiringan lereng Kabupaten Barru	125
Gambar 53	Peta skoring jenis tanah Kabupaten Barru	126
Gambar 54	Peta skoring tingkat kerawanan bencana Kabupaten Barru	127
Gambar 55	Peta kondisi aksesibilitas di Kabupaten Barru	130
Gambar 56	Peta kondisi ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Barru	131
Gambar 57	Peta kondisi ketersediaan bahan baku tanaman pangan di Kabupaten Barru.....	132
Gambar 58	Peta kondisi ketersediaan bahan baku perkebunan di Kabupaten Barru.....	133
	59 Peta kondisi sarana dan prasarana pendukung di Kabupaten Barru	136
	50 Peta kondisi aglomerasi di Kabupaten Barru	137



Gambar 61	Peta kondisi kelembagaan di Kabupaten Barru.....	139
Gambar 62	Peta skoring ketersediaan lahan Kabupaten Barru	140
Gambar 63	Bagan alur penggabungan kriteria.....	141
Gambar 64	Peta kesesuaian sentra industri pertanian tanaman pangan Kabupaten Barru.....	143
Gambar 65	Peta kesesuaian sentra industri perkebunan Kabupaten Barru	144
Gambar 66	Peta sentra industri pertanian tanaman pangan komoditas padi Kabupaten Barru.....	154
Gambar 67	Peta sentra industri perkebunan komoditas kakao Kabupaten Barru.....	155
Gambar 68	Peta sentra industri perkebunan komoditas jambu mete Kabupaten Barru.....	156
Gambar 69	Peta sentra industri perkebunan komoditas kelapa Kabupaten Barru.....	157
Gambar 70	Peta lokasi sentra industri komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan Kabupaten Barru	158
Gambar 71	Peta kesesuaian RTRW kabupaten dengan lokasi sentra industri komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan Kabupaten Barru	159



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kriteria peruntukan industri menurut Permenperin No. 30 Tahun 2022.....	8
Tabel 2	Kajian teori faktor pemilihan lokasi sentra industri.....	12
Tabel 3	Kuesioner perbandingan berpasangan.....	22
Tabel 4	Potensi lahan pertanian Kabupaten Barru menurut RTRW	26
Tabel 5	Keterkaitan misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten Barru	28
Tabel 6	Studi penelitian terdahulu	29
Tabel 7	Variabel penelitian	36
Tabel 8	Kriteria penentuan sentra industri pertanian tanaman pangan dan perkebunan	41
Tabel 9	Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Barru	48
Tabel 10	Kemiringan lereng Kabupaten Barru	50
Tabel 11	Jenis tanah Kabupaten Barru.....	52
Tabel 12	Kerawanan bencana Kabupaten Barru	52
Tabel 13	Curah hujan Kabupaten Barru.....	53
Tabel 14	Penggunaan lahan Kabupaten Barru	54
Tabel 15	Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Barru tahun 2018-2022	60
Tabel 16	Jumlah pencari kerja terdaftar menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Barru tahun 2022	62
Tabel 17	PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Barru (juta rupiah) tahun 2018-2022	63
Tabel 18	Jumlah produksi komoditas subsektor tanaman pangan Provinsi Sulawesi Selatan.....	65
Tabel 19	Jumlah produksi komoditi subsektor pertanian tanaman pangan Kabupaten Barru tahun 2018 dan 2022.....	65
	Jumlah produksi komoditas subsektor perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.....	66



Tabel 21	Jumlah produksi komoditi subsektor pertanian tanaman pangan Kabupaten Barru tahun 2018 dan 2022.....	66
Tabel 22	Klasifikasi jaringan jalan di Kabupaten Barru	67
Tabel 23	Stasiun kereta api yang terdapat di Kabupaten Barru	69
Tabel 24	Pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Barru	72
Tabel 25	Sarana dan prasarana pendukung di Kabupaten Barru	75
Tabel 26	Industri sejenis yang terdapat di Kabupaten Barru	75
Tabel 27	Kelembagaan yang terdapat di Kabupaten Barru.....	76
Tabel 28	Nilai LQ produksi subsektor tanaman pangan Kabupaten Barru terhadap Provinsi Sulawesi Selatan	77
Tabel 29	Nilai LQ produksi subsektor perkebunan Kabupaten Barru terhadap Provinsi Sulawesi Selatan	78
Tabel 30	Jumlah produksi komoditas subsektor tanaman pangan Kabupaten Barru	79
Tabel 31	Nilai LQ komoditas tanaman pangan Kabupaten Barru	79
Tabel 32	Jumlah produksi komoditas subsektor perkebunan Kabupaten Barru.....	80
Tabel 33	Nilai LQ komoditas perkebunan Kabupaten Barru.....	81
Tabel 34	Jumlah produksi komoditi subsektor pertanian tanaman pangan menurut kecamatan di Kabupaten Barru tahun 2018 dan 2022	83
Tabel 35	Analisis Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) subsektor pertanian tanaman pangan.....	84
Tabel 36	Hasil analisis <i>shift share</i> (PPW) tanaman pangan Kabupaten Barru.....	85
Tabel 37	Analisis Pertumbuhan Proporsional (PP) subsektor pertanian tanaman pangan.....	86
Tabel 38	Hasil analisis <i>shift share</i> (PP) tanaman pangan Kabupaten Barru....	87
Tabel 39	Analisis Pergeseran Bersih (PB) subsektor pertanian tanaman pangan	88
	Hasil analisis <i>shift share</i> (PB) tanaman pangan Kabupaten Barru ...	89
	Jumlah produksi komoditi subsektor perkebunan menurut kecamatan di Kabupaten Barru tahun 2018 dan 2022	90



Tabel 42	Analisis Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) subsektor perkebunan	91
Tabel 43	Hasil analisis <i>shift share</i> (PPW) perkebunan Kabupaten Barru.....	92
Tabel 44	Analisis Pertumbuhan Proporsional (PP) subsektor perkebunan.....	93
Tabel 45	Hasil analisis <i>shift share</i> (PP) perkebunan Kabupaten Barru	94
Tabel 46	Hasil analisis Pergeseran Bersih (PB) subsektor perkebunan.....	95
Tabel 47	Hasil analisis <i>shift share</i> (PB) perkebunan Kabupaten Barru	96
Tabel 48	Klasifikasi komoditas unggulan.....	96
Tabel 49	Klasifikasi komoditas unggulan dan potensial subsektor tanaman pangan menurut kecamatan di Kabupaten Barru	97
Tabel 50	Kompilasi hasil analisis LQ dan <i>shift share</i> subsektor tanaman pangan	98
Tabel 51	Klasifikasi komoditas unggulan dan potensial subsektor perkebunan menurut kecamatan di Kabupaten Barru	106
Tabel 52	Kompilasi hasil analisis LQ dan <i>shift share</i> subsektor perkebunan	107
Tabel 53	Kriteria penentuan sentra industri pertanian tanaman pangan dan perkebunan	114
Tabel 54	Penilaian kriteria kemiringan lahan Kabupaten Barru	123
Tabel 55	Penilaian kriteria jenis tanah Kabupaten Barru.....	124
Tabel 56	Penilaian kriteria kerawanan bencana Kabupaten Barru	124
Tabel 57	Penilaian kriteria aksesibilitas Kabupaten Barru	128
Tabel 58	Penilaian kriteria tenaga kerja Kabupaten Barru	128
Tabel 59	Penilaian kriteria ketersediaan bahan baku tanaman pangan Kabupaten Barru	129
Tabel 60	Penilaian kriteria ketersediaan bahan baku perkebunan Kabupaten Barru	129
Tabel 61	Penilaian kriteria aglomerasi Kabupaten Barru	134
Tabel 62	Penilaian kriteria sarana dan prasarana pendukung Kabupaten Barru.....	135
	Penilaian kriteria kelembagaan Kabupaten Barru.....	138
	Penilaian kriteria ketersediaan lahan Kabupaten Barru	138



Tabel 65	Persentase kesesuaian sentra industri pertanian tanaman pangan menurut kecamatan di Kabupaten Barru.....	142
Tabel 66	Persentase kesesuaian sentra industri perkebunan menurut kecamatan di Kabupaten Barru	142
Tabel 67	Kompilasi variabel penentu lokasi prioritas sentra industri komoditas padi	146
Tabel 68	Klasifikasi prioritas pengembangan sentra industri pertanian tanaman pangan komoditas padi di Kabupaten Barru.....	146
Tabel 69	Kompilasi variabel penentu lokasi prioritas sentra industri komoditas kakao.....	148
Tabel 70	Klasifikasi prioritas pengembangan sentra industri perkebunan komoditas kakao di Kabupaten Barru	148
Tabel 71	Kompilasi variabel penentu lokasi prioritas sentra industri komoditas jambu mete	150
Tabel 72	Klasifikasi prioritas pengembangan sentra industri perkebunan komoditas jambu mete di Kabupaten Barru.....	150
Tabel 73	Kompilasi variabel penentu lokasi prioritas sentra industri komoditas kelapa.....	152
Tabel 74	Klasifikasi prioritas pengembangan sentra industri perkebunan komoditas kelapa di Kabupaten Barru	152
Tabel 75	Kompilasi lokasi prioritas pengembangan sentra industri	153



DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI SIMBOL

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
AHP	<i>Analytical Hierarchy Process</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
BTS	<i>Base Transceiver Station</i>
ILWIS	<i>The Integrated Land and Water Information System</i>
LQ	<i>Location Quotient</i>
nt	Nilai produksi komoditas i kabupaten tahun awal
NT	Nilai produksi sektor kabupaten tahun awal
nt'	Nilai produksi komoditas i kabupaten tahun akhir
NT'	Nilai produksi sektor kabupaten tahun akhir
PB	Pergeseran Bersih
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Permenperin	Peraturan Menteri Perindustrian
Permentan	Peraturan Menteri Pertanian
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PP	Pertumbuhan Proporsional
PPW	Pertumbuhan Pangsa Wilayah
ri	Nilai produksi komoditas i kecamatan tahun awal
ri'	Nilai produksi komoditas i kecamatan tahun akhir
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SMCE	<i>Spatial Multi-Criteria Evaluation</i>
UU	Undang Undang
vi	Jumlah produksi pada sektor i di kecamatan
Vi	Jumlah produksi pada sektor i di kabupaten
vt	Jumlah total produksi di kecamatan
Vt	Jumlah total produksi di kabupaten



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuisisioner.....	168
Lampiran 2	Pemasukan data kuisisioner ke dalam <i>Expert Choice</i>	171
Lampiran 3	Proses analisis <i>Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE)</i>	176



KATA PENGANTAR

Syukur bagi Allah, segala hormat bagi Tuhan, Bapa yang Mahapengasih dan Mahapenolong atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Benar isi Roma Pasal 8 ³¹Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? ³⁷Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita.

Terdapat banyak kendala dan tantangan yang penulis hadapi selama penyusunan tugas akhir ini, namun atas berkat penyertaan-Nya serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga tugas akhir yang berjudul **“Pemodelan Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) dalam Pengembangan Sentra Industri Berbasis Komoditas Unggulan Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Barru”** dapat diselesaikan sebagai syarat utama dalam penyelesaian studi jenjang Strata 1 Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tugas akhir ini memberikan manfaat bagi setiap pembaca dan juga menambah ilmu bagi penulis. Terima kasih.

Gowa, 11 Desember 2023



(Bijak Anggun Piranti Sembiring)

Sitasi dan Alamat Kontak:

Harap menuliskan sumber skripsi ini dengan cara penulisan sebagai berikut.

Sembiring, Bijak A. P. 2023. *Pemodelan Spatial Multi-Criteria Evaluation dalam Pengembangan Sentra Industri Berbasis Komoditas Unggulan Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Barru*. Skripsi Prodi S1 PWK Universitas Hasanuddin. Makassar.



Peningkatan kualitas dari skripsi ini, kritik dan saran dapat dikirimkan ke melalui alamat email berikut ini: bijakanggun11@gmail.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mengakui dan mengapresiasi setiap bantuan dan dorongan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada.

1. Allah Tritunggal atas berkat kasih penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan baik. Doa, pujian dan syukur penulis naikkan kepada Allah Bapa, Allah Putera dan Allah Roh Kudus yang telah menjadi penopang dan sumber kekuatan bagi penulis
2. Kedua orangtua tercinta (Bapak Damoris Sembiring A.P., M.Si. dan Ibu Rosmasari Bungin Buntutugajang S.M.) atas segala doa, kasih sayang, dukungan baik secara moral maupun materi. Segala doa dipanjatkan semoga Tuhan senantiasa memberkati memberi kesehatan juga umur panjang.
3. Saudara tercinta (Bakti Dat Melona Sembiring) atas doa, semangat dan bantuannya selama survei berlangsung, tetap semangat menjalani perkuliahan, selamat mengejar gelar S.H dan selalu mengandalkan Tuhan.
4. Rektor Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.) telah memfasilitasi penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
5. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, S.T., M.T.) atas dukungan dan kebijakannya.
6. Kepala Departemen S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Bapak Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, S.T. M.Si.) dan Sekretaris Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Ibu Sri Aliah Ekawati, S.T., M.T.) atas bimbingan akademik dan administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
7. Dosen Penasehat Akademik sekaligus Kepala Studio Akhir (Ibu Dr.Techn. Yashinta K. D. Sutopo, S.T., MIP) atas segala nasihat dan kepercayaannya na menjalani masa perkuliahan.



8. Dosen Pembimbing Utama (Bapak Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, S.T. M.Si.) atas arahan, nasihat, bimbingan, ilmu, dan kepercayaan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Dosen Pembimbing Pendamping (Ibu Isfa Sastrawati, S.T., M.T.) atas motivasi, dukungan, kasih sayang, ilmu, nasihat, kesabaran, bantuan, pengalaman, dan kepercayaan yang selalu diberikan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
10. Dosen Penguji (Dr. Eng. Ihsan, S.T., M.T dan Irwan, S.T., M.Eng.) atas bimbingan, ilmu, koreksi, saran serta arahan yang telah diberikan semata-mata untuk peningkatan kualitas karya penulis.
11. Kepala LBE Perencanaan Wilayah, Pariwisata dan Mitigasi Bencana Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin (Bapak Dr. Eng. Ihsan, S.T., M.T.) atas waktu, bimbingan dan nasehatnya kepada penulis.
12. Seluruh dosen Departemen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
13. Seluruh Staf Administrasi dan Pelayanan PWK Universitas Hasanuddin atas kebaikan, kesabaran, ketelatenan dan bantuannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
14. Teman-teman angkatan PWK 2019 atas kerja sama, canda tawa dan kebersamaan selama sembilan semester ini.
15. Teman-teman Tim SMCE atas kerja sama, *support* serta semangat juang bersama selama penyusunan tugas akhir.
16. Teman-teman seperjuangan Studio Tugas Akhir Tim 21 atas kebersamaan, canda tawa, dan perjuangan bersama selama berada di studio akhir.
17. Rumah kedua penulis selama menempuh perkuliahan kakak, teman dan adik KMKO Arsitektur terkhusus KMKO Arsitektur 2019 atas segala kebersamaan, suka duka kepanitiaan, canda tawa dan kekeluargaan yang in, *God bless us.*



bat-sahabat WACANA yang telah menjadi sahabat terbaik sejak 2019
adi tempat berbagi cerita dan keluh kesah selama perkuliahan.

19. Sahabat-sahabat Meniti Masa Depan yang telah menjadi tempat ternyaman untuk berkeluh kesah, serta penyemangat bagi penulis selama ini.
20. Sahabat-sahabat Pajak PPN atas persaudaraan dan canda tawa yang tidak pernah berubah dari kecil.
21. Seluruh pimpinan dan staff pemerintah Kabupaten Barru, atas bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis.
22. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Tuhan senantiasa memberkati dan memberi kesehatan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan memperluas wawasan bagi kita semua.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pembangunan perekonomian wilayah yang berdaya saing tinggi agar dapat terus tumbuh dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai bagian dari integrasi untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta, daya saing daerah.

Gejala pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dapat diamati melalui indikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui proses pertumbuhan ekonomi akan tercermin aktivitas ekonomi yang dijalankan dan dicapai oleh suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Keterlibatan sektor-sektor ekonomi memainkan peran yang sangat penting dalam mengokohkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa terlepas dari hasil yang dicapai oleh berbagai sektor yang berkontribusi pada PDRB suatu wilayah. Sektor ekonomi unggulan yang menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB dan kemajuan ekonomi daerah perlu dijadikan prioritas dalam penyusunan kebijakan oleh pemerintah daerah. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, diperlukan berbagai kriteria khusus untuk menentukan sektor unggulan atau sektor basis. Sektor unggulan merujuk pada sektor yang memiliki peran signifikan dalam perkembangan perekonomian suatu wilayah. Sektor basis menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah karena mampu menghasilkan pendapatan baik bagi wilayah itu sendiri maupun wilayah lain.

Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang sangat penting, Mardianto (2007) menyebutkan dua faktor yang mempengaruhi hal tersebut pertama, sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dihasilkan oleh suatu negara. Kedua, sektor pertanian merupakan sektor basis



penghubung pasar yang akan berdampak pada proses pembangunan. Sektor ini juga memiliki potensi untuk membentuk koneksi, yang jika ditemani oleh kondisi yang sesuai, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pembangunan. Poin lainnya, sektor ini berperan sebagai sumber pendapatan yang penting bagi pembangunan, serta menjadi sumber lapangan kerja dan penghasilan bagi mayoritas penduduk di negara-negara berkembang yang tinggal di wilayah pedesaan (Pratomo, 2010).

Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dengan potensi pertanian yang cukup besar. Berdasarkan Kementan No. 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, Kabupaten Barru menjadi lokasi prioritas dalam pengembangan sektor pertanian. Perekonomian Kabupaten Barru didominasi oleh sektor pertanian khususnya pada subsektor perikanan dan pertanian. Hal ini dapat dilihat pada data hasil produksi pertanian yang meningkat di tahun 2022 dengan laju pertumbuhan sebesar 4,51%. Selain itu, sektor pertanian juga berkontribusi sebesar 35,02% terhadap total PDRB di Kabupaten Barru serta merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dibanding dengan sektor lainnya (BPS Kabupaten Barru, 2023). Penggunaan lahan untuk produksi sektor pertanian adalah sebesar 47.830,75 Ha atau sebesar 40% dari total luas wilayah Kabupaten Barru yang terdiri dari 24% pertanian lahan kering dan 16% sawah. Persaingan wilayah di tiap tahunnya juga semakin meningkat dimana saat ini Kabupaten Barru berada di posisi 8 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Untuk mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Barru, diperlukan adanya suatu upaya dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Barru agar dapat bersaing dengan daerah lainnya.

Penentuan komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Barru selama ini hanya berdasarkan potensi produksi dari komoditas tersebut dan belum secara spesifik dilakukan pengembangan pasca produksi untuk meningkatkan nilai jual dari produksi komoditas unggulan. Penentuan sentra industri pada sektor basis



dapat menjadi salah satu upaya dalam pengelompokan hasil pertanian mudian diolah menjadi produk bernilai tinggi yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi dan pemaksimalan potensi dan sumber daya alam,

dengan tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa sektor pertanian Kabupaten Barru memiliki potensi besar untuk berkembang seperti kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pemodelan *Spatial Multi-Criteria Evaluation* (SMCE) dalam Pengembangan Sentra Industri Berbasis Komoditas Unggulan Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Barru”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Barru?
2. Bagaimana kesesuaian lahan sentra industri dalam pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Barru dengan menggunakan model *Spatial Multi-Criteria Evaluation* (SMCE)?
3. Bagaimana penentuan lokasi prioritas dalam pengembangan sentra industri komoditas pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Barru?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memetakan potensi komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Barru.
2. Mengevaluasi kesesuaian lokasi sentra industri dalam pengembangan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Barru.
3. Menentukan lokasi prioritas dalam pengembangan sentra industri komoditas pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Barru.

1.4. Manfaat Penelitian



Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran atau masukan bagi pemerintah kedepannya dalam

pemilihan lokasi prioritas dan sesuai untuk sentra industri dalam rangka mendukung pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Barru.

2. Manfaat bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi dan penelitian berikutnya mengenai penerapan model SMCE dalam pemilihan lokasi sentra industri yang sesuai dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Barru.
3. Manfaat bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi dalam peningkatan ekonomi wilayah yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
4. Manfaat bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait dengan penggunaan model SMCE dalam pengembangan wilayah.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini adalah Kabupaten Barru yang secara administratif memiliki luas sebesar 119.461 Ha dan terdiri atas 7 kecamatan. Penulis memilih lokasi ini karena penulis tertarik dengan potensi pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Barru. Adapun ruang lingkup substansi dalam penelitian ini difokuskan pada identifikasi potensi komoditas unggulan pertanian serta evaluasi kesesuaian lokasi komoditas unggulan subsektor tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Barru dengan menggunakan pemodelan SMCE.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah terdiri dari 2 kata, yaitu pengembangan dan wilayah. Menurut Budiharsono (2002) pengembangan merupakan suatu proses menciptakan potensi yang memunculkan potensi-potensi baru dari potensi-potensi yang terbatas, dan juga termasuk mencari potensi berbeda dari beragam kelompok yang mempunyai potensi yang berbeda. Sedangkan kata wilayah itu sendiri merupakan lingkungan daerah geografis dan didalamnya terdapat interaksi antar komponen wilayah secara fungsional (Rustiadi dkk., 2011). UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga menjelaskan wilayah sebagai unit geografis dengan komponen-komponen terikat dengan batas dan sistem dengan dasar penentuannya adalah aspek administratif dan fungsional. Pengembangan wilayah pada dasarnya diterapkan dengan tujuan pemerataan serta pengembangan keruangan secara fisik maupun sosial ekonomi. Dalam kacamata ekonomi, pengembangan wilayah harus mampu melihat peluang dan penawaran wilayah sesuai dengan potensi dan permintaan yang dimiliki. Sehingga wilayah akan berkonsentrasi mengembangkan produksi barang dan jasa berdasarkan peluang dan penawaran.

Dirjen Penataan Ruang (2003) mengemukakan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah yaitu: 1) sebagai pusat pertumbuhan, dimana perkembangan wilayah tidak hanya terbatas pada perluasan internal wilayah, melainkan juga harus mempertimbangkan penyebaran atau dampaknya (efek penyebaran) terhadap pertumbuhan yang mungkin mempengaruhi wilayah sekitarnya bahkan secara nasional; 2) pertumbuhan wilayah memerlukan kerjasama antar daerah dalam usaha pengembangan wilayah dan merupakan faktor krusial dalam mencapai kesuksesan dalam pembangunan wilayah; 3) pendekatan komprehensif dalam pengembangan wilayah menggabungkan daerah di dalam wilayah tersebut melalui pendekatan yang pankan kesetaraan dan; 4) dalam proses pengembangan wilayah, adopsi



mekanisme pasar juga perlu menjadi langkah awal dalam merencanakan perkembangan daerah.

Adisasmita (2008) menyatakan bahwa pembangunan wilayah merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Sehingga konsepsi pengembangan wilayah di Indonesia *by legal* dan *empirical* bersifat gabungan *mixed-concept*, yaitu adanya struktur ruang yang terdiri dari pusat-pusat permukiman sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan sosial secara hierarkis sebagai pusat yang akan memberikan pelajaran pengembangan dan jaringan infrastruktur wilayah sebagai media/alat untuk menjalankannya yaitu dengan jaringan transportasi (jalan, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan *link*-nya), listrik telepon, energi, jaringan sumberdaya air, dan pola ruang yang terdiri dari pengaturan kawasan yang berfungsi lindung (*ecological approach*) seperti hutan lindung, hutan taman nasional, hutan bakau, taman buru dan lainnya serta kawasan budidaya untuk kegiatan manusia meningkatkan produktivitasnya bagi tumbuh dan berkembang ekonomi wilayah dan kegiatan sosial seperti untuk kegiatan pertambangan, industri, pariwisata, perikanan, dan kawasan permukiman (Djakapermana, 2009).

2.2. Industri

Kawasan industri merupakan salah satu upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi industri dalam memenuhi permintaan barang maupun jasa dalam negeri ataupun ekspor. Kawasan industri merujuk pada pengelompokan kegiatan industri di suatu daerah tertentu dan erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di wilayah tersebut. Permenperin No. 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri menyatakan kawasan



an industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang n sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri (Permenperin No. 30 Tahun 2020). Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan perindustrian diselenggarakan dengan tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri.
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan usaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional.
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Industri pertanian (agroindustri) adalah suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya atau suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang digunakan sebagai saran atau *input* dalam usaha pertanian. Kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut (Udayana, 2011). Kawasan peruntukan industri hanya dapat berdiri jika memenuhi beberapa kriteria yaitu berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan ngubah lahan produktif (Permenperin No. 30 Tahun 2020). Kriteria peruntukan industri berdasarkan Permenperin No. 30 Tahun 2020 1 pada Tabel 1.



Tabel 1 Kriteria peruntukan industri menurut Permenperin No. 30 Tahun 2022

No	Kriteria Teknis	Keterangan
1	Status dan pola guna lahan	1. Tidak berada pada lahan penguasaan adat 2. Tidak berada pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 3. Tidak berada pada kawasan lindung
2	Kondisi lahan	Bukan merupakan daerah rawan bencana risiko tinggi
3	Luas lahan	1. Luas lahan minimal 50 Ha 2. Luas lahan untuk industri kecil 5 Ha
4	Jarak ke pusat kota	Minimal 10 km
5	Jarak ke permukiman	Minimal 2 km
6	Jarak terhadap sungai	Maksimal 5 km
7	Aksesibilitas	Arteri primer
8	Daya dukung lahan	Sigma tanah: 0,7 – 1,0 km/cm ²
9	Topografi	Maksimal 15%
10	Listrik	0,15 – 0,2 MVA/Ha
11	Telekomunikasi	20 – 40 SST/Ha
12	Sumber air baku	0,55 – 0,75 liter/dtk/Ha
13	Tenaga Kerja	90 – 110 TK/ha
14	Kebutuhan hunian	1,5 TK/Ha
15	Pembuangan limbah	<i>Reuse</i> limbah

Sumber: Permenperin No. 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri

Kebijakan pemerintah dalam bentuk perizinan pembangunan kawasan industri menjadi faktor utama dapat terbangunnya kawasan. Kriteria peruntukan industri pada Tabel 1 menjelaskan bahwa terdapat kriteria spesifik yang harus diperhatikan dalam pengembangan sebuah kawasan menjadi kawasan industri.

2.2.1. Sentra Industri

Sentra adalah suatu kawasan dengan ciri-ciri tertentu tempat berlangsungnya kegiatan produksi dan merupakan tempat terjadinya kegiatan ekonomi dengan infrastruktur penunjang guna perkembangannya suatu usaha. Kawasan sentra industri (Oktriyana, 2017). Richardson (2001) menyatakan bahwa sentra industri sebagai pengelompokan industri sejenis dalam suatu kawasan, dimana sentra industri berperan sebagai wilayah sosial yang ditandai dengan adanya komunitas manusia dan perusahaan, dan keduanya cenderung bersatu. Jadi, sentra industri



merupakan pengertian suatu wilayah dimana didalamnya terdapat kelompok industri-industri yang sejenis untuk mengembangkan produk di wilayah tersebut.

Sentra industri merupakan kawasan industri dengan infrastruktur penunjang proses produksi dan distribusi suatu hasil komoditi sejenis, yang menghasilkan produk dan proses produksi yang sama, kehadiran sentra industri mampu meningkatkan potensi berkembangnya perekonomian wilayah dibawah pengaruh pasar dengan nilai jual produk dan daya saing yang tinggi.

2.2.2. Faktor Penentuan Lokasi Sentra Industri

Penentuan lokasi sentra industri memerlukan beberapa kajian teori guna memperoleh lokasi sentra yang paling efisien yang mampu menarik pelaku usaha (produsen, tenaga kerja dan investor) untuk menjadikan suatu lokasi sebagai pusat industri yang terpadu. Faktor lokasi merupakan faktor utama yang menjadi daya tarik suatu sentra industri dalam mempengaruhi keputusan calon investor untuk menanamkan modal pada suatu sentra industri. Berikut beberapa kajian teori sebagai pertimbangan dalam penentuan lokasi sentra industri, menurut Sigit (2009) dalam Sari (2017) lokasi sentra industri dipilih atas beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pasar, salah satu elemen dalam pasar yang memerlukan perhatian adalah kedekatannya dengan perusahaan, jumlah dan mutu barang yang dibutuhkan oleh pasar, dan kapasitas pembelian masyarakat terhadap jenis barang yang dihasilkan.
2. Bahan baku, hubungan bahan baku dengan biaya produksi memiliki ikatan yang kuat sehingga penentuan lokasi perusahaan harus dipertimbangkan untuk mengurangi biaya bahan baku secara efektif.
3. Tenaga kerja, pertimbangan terkait tenaga kerja menjadi faktor signifikan terutama bagi perusahaan yang mengandalkan tenaga kerja yang besar atau memiliki biaya produksi yang dominan dalam hal tenaga kerja.
4. Transportasi, lokasi perusahaan turut dipengaruhi oleh faktor-faktor transportasi yang menghubungkan lokasi tersebut dengan pasar, bahan baku, dan tenaga kerja.
5. Kebijakan pemerintah, kebijakan dan regulasi perdagangan yang mendorong standar produk serta pengaturan dalam distribusi pemasaran.



Wojodipuro (1992) menjelaskan bahwa faktor-faktor penentuan lokasi meliputi:

1. Pasar dan harga, pasar perlu mampu menjual produknya dengan nilai harga yang melebihi biaya produksinya. Dimensi pasar ditetapkan oleh tiga faktor, yaitu jumlah populasi, pendapatan per individu, dan distribusi pendapatan.
2. Bahan baku dan energi, tahap produksi adalah upaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah. Proses transformasi ini memerlukan berbagai bentuk energi. Bahan baku yang digunakan dapat berupa komoditas mentah atau barang yang sudah sebagian diolah.
3. Aglomerasi, kota besar seringkali menjadi opsi tempat industri yang menarik. Keuntungan dari konsentrasi ini bisa berwujud dalam penghematan di antara industri-industri yang sama atau yang berhubungan, juga penghematan bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di kawasan perkotaan, terutama berkat kemajuan infrastruktur di kawasan tersebut.
4. Kebijakan pemerintah, dapat berfungsi sebagai pendorong, penghambat, atau bahkan pembatasan untuk industri berlokasi di suatu tempat tertentu. Tindakan ini mungkin akan berhubungan dengan pengaturan lingkungan, pertimbangan pertahanan, atau pertimbangan ekonomi.
5. Sarana prasarana (jaringan), ketersediaan infrastruktur bisa berkontribusi pada produktivitas industri, termasuk penyediaan pasokan air bersih, listrik, sistem pembuangan air, dan hal-hal lainnya. Lokasi cabang perusahaan seringkali ditentukan berdasarkan fungsinya sebagai unit produksi, dengan mempertimbangkan masalah bahan baku dan pasar. Sebaliknya, jika cabang berfungsi sebagai unit distribusi, lokasi yang strategis seperti simpang jalan bisa dipertimbangkan untuk memudahkan pengangkutan ke berbagai arah.

Weber (1990) dalam Tarigan (2005) menyebutkan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi industri yaitu:

1. Bahan baku, ketersediaan sumber bahan mentah memegang peranan vital dalam proses produksi, di mana bahan baku diubah menjadi produk akhir dengan tambahan nilai. Jarak antara tempat industri dengan sumber bahan baku berdampak pada biaya pengangkutan. Industri perlu menempatkan fasilitas

produksi dekat dengan sumber bahan baku untuk proses pengolahan.

transportasi, biaya pengangkutan meningkat seiring dengan jarak yang ditempuh. Titik biaya transportasi terendah terjadi di tempat di mana



biaya angkut bahan baku dan distribusi produk jadi mencapai titik minimum. Konsep ini disebut sebagai segitiga lokasi.

3. Upah tenaga kerja, penghematan biaya per unit produksi lebih dominan daripada peningkatan biaya transportasi per unit produksi saat lokasi dipindahkan lebih dekat dengan sumber tenaga kerja.
4. Aglomerasi, adanya permintaan antara produk-produk di berbagai industri bisa berujung pada ketersediaan infrastruktur seperti pasokan listrik, air, bengkel, dan fasilitas untuk staf yang sama. Fasilitas ini bisa menurunkan biaya produksi atau kebutuhan investasi karena jika terpisah jauh, setiap industri harus membangun fasilitas mereka sendiri.

Radjiman (1998) dalam Sari (2009) menyatakan lokasi sentra industri dipilih atas beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Bahan baku, kemampuan untuk mengakses suplai bahan baku memegang peranan yang signifikan karena berkaitan dengan produksi bahan baku menjadi produk yang dapat dijual atau diolah lebih lanjut dalam industri, serta dampak kondisi alami bahan baku pada biaya dan seleksi tempat.
2. Tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja menjadi faktor penting, baik dalam segi kuantitas bagi industri yang memerlukan jumlah tenaga kerja besar dengan biaya rendah, maupun dalam segi kualitas di mana beberapa industri memerlukan tenaga kerja terampil khususnya dalam industri yang menggunakan teknologi tinggi.
3. Transportasi, industri modern sangat memerlukan fasilitas transportasi yang baik dengan biaya rendah, karena hal ini sangat mendukung kelancaran kegiatan industri tersebut.
4. Pasar, baik pasar lokal maupun internasional memiliki elemen krusial yang melibatkan jumlah calon konsumen. Industri yang berfokus pada pasar harus mempertimbangkan kedekatan dengan pasar sebagai faktor yang krusial.
5. Pengaruh pemerintah, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam penentuan letak industri. Pemerintah bisa memberikan insentif kepada pelaku



investor untuk mendorong pertumbuhan industri di suatu daerah, atau mendalikan perkembangan industri yang melebihi kapasitas yang ada dan lungi industri lokal atau yang ingin dikembangkan.

6. Aglomerasi, pengelompokan beberapa perusahaan di dalam suatu kawasan atau wilayah yang membentuk klaster industri khusus.

Terdapat beberapa kesamaan faktor yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli dalam penentuan lokasi yang sesuai dalam pengembangan sentra industri di suatu wilayah. Ringkasan faktor penentuan lokasi sentra industri yang telah dikemukakan oleh 4 ahli dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Kajian teori faktor pemilihan lokasi sentra industri

No	Faktor Pemilihan Lokasi Sentra Industri	Sigit dalam Aini (2009)	Djojodipuro (1992)	Weber dalam Tarigan (2005)	Radjiman (1998) dalam Sari (2017)
1	Transportasi (Aksesibilitas)	✓		✓	✓
2	Tenaga Kerja	✓		✓	✓
3	Bahan Baku	✓	✓	✓	✓
4	Sarana dan Prasarana		✓		
5	Aglomerasi		✓	✓	✓
6	Pasar (Kelembagaan)	✓	✓		✓
7	Kebijakan Pemerintah	✓	✓		✓

Sumber: Pendapat para ahli, dimodifikasi oleh penulis, 2023

Dari kajian teori yang telah dikompilasi pada Tabel 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan sentra industri memerlukan beberapa kriteria yang akan menunjang kegiatan sentra industri nantinya yaitu aksesibilitas, tenaga kerja, bahan baku, sarana dan prasarana, aglomerasi, kelembagaan serta kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah Permenperin No. 30 Tahun 2020.

2.3. Komoditas Unggulan

Komoditas unggulan adalah komoditas andalan yang memiliki posisi strategis, baik berdasarkan pertimbangan teknis (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur dan kondisi sosial budaya setempat), untuk dikembangkan di suatu wilayah (Yulianti, 2011). Kriteria komoditi unggul menurut Daryanto dan Hafizrianda (2010) adalah:



posisi sebagai pusat yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Secara nasional, komoditas unggulan harus memiliki kapabilitas untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi, pendapatan, serta pengeluaran.

2. Harus memiliki kemampuan untuk bersaing dengan produk serupa yang berasal dari daerah lain (daya saing), baik dalam hal harga produk, biaya produksi, maupun kualitas pelayanan, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional.
3. Proses pengembangannya memerlukan beragam jenis dukungan, seperti keamanan, dimensi sosial dan budaya, informasi serta peluang di pasar, struktur institusional, fasilitas yang ditingkatkan, dan unsur-unsur lainnya.

Analisis potensi wilayah merupakan salah satu bahan dalam perencanaan peningkatan pembangunan suatu daerah. Penentuan ini penting dengan pertimbangan bahwa ketersediaan dan kapabilitas sumber daya (alam, modal dan manusia) untuk menghasilkan dan memasarkan semua komoditas yang dapat diproduksi di suatu wilayah secara simultan relatif terbatas (Hidayah, 2010). Pemerintah perlu memilah-milah subsektor mana yang mempunyai keunggulan, dan betul-betul dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan PDRB (Azhar dkk., 2003). Pemerintah daerah harus mengetahui dengan pasti apa saja yang merupakan sektor basis maupun sektor non basis serta sektor-sektor mana sajakah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga nantinya sektor potensial tersebut dapat menjadi sektor basis yang baru di daerah tersebut (Yuuhaa dan Hendry, 2013).

2.4. Pertanian

Pertanian merupakan jenis kegiatan produksi yang berkaitan dengan cocok tanam, peternakan, perikanan dan kehutanan. Pertanian terdiri dari 4 komponen yaitu proses produksi, petani atau pengusaha pertanian, tanah tempat usaha, dan usaha pertanian (Soetriono dkk., 2006). Sektor pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional, baik sumbangan langsung seperti dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan melalui ekspor dan penekanan inflasi, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan unan dan hubungan sinergis dengan sektor lain (Departemen Pertanian, ehingga pengembangan sektor pertanian perlu menjadi fokus utama



pemerintah dalam pengembangannya di Indonesia, dimana pertanian juga menjadi sektor penggerak ekonomi yang utama pada negara-negara berkembang.

Sektor pertanian merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional, mengingat sektor pertanian terbukti masih dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional walaupun badai krisis menerpa. Hal ini dikarenakan terbukanya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan tingginya sumbangan devisa yang dihasilkan (Kementan, 2021). Menurut Mardianto (2007) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sektor pertanian dalam perannya sebagai penggerak utama pertumbuhan perekonomian di suatu negara:

1. Sektor pertanian berperan sebagai sumber utama penyediaan pangan dan bahan mentah yang diperlukan oleh suatu negara.
2. Dorongan demografis yang signifikan di negara-negara berkembang, yang diikuti oleh pertumbuhan pendapatan sebagian warganya, mengakibatkan permintaan tersebut terus meningkat.
3. Sektor pertanian memiliki potensi untuk menyediakan unsur-unsur yang diperlukan untuk ekspansi sektor lain, terutama industri. Pada umumnya, unsur-unsur ini melibatkan modal, tenaga kerja, dan bahan baku.
4. Pertanian memiliki peran yang sentral dalam jaringan pasar yang sangat penting, yang mempengaruhi proses pembangunan. Sektor ini juga memiliki kemampuan untuk membentuk koneksi maju-mundur yang, jika diterapkan dalam situasi yang tepat, dapat memberikan kontribusi yang substansial terhadap pembangunan.
5. Sektor pertanian merupakan sumber pemasukan yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari sebagian besar penduduk negara-negara berkembang yang hidup di pedesaan (Pratomo, 2010).

Jhingan (2008) memaparkan sumbangan atau jasa sektor pertanian pada pembangunan ekonomi terletak dalam hal:

1. Menyediakan lebih banyak surplus pangan bagi populasi yang terus tumbuh.



2. Mengurangi permintaan terhadap produk industri yang menyebabkan defisit perdagangan untuk memperluas sektor manufaktur dan jasa.

3. Menghasilkan pendapatan tambahan dalam bentuk devisa untuk mendukung impor peralatan produksi guna pembangunan melalui ekspor hasil pertanian yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan pendapatan di wilayah pedesaan dengan arahan dari pemerintah.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.4.1. Tanaman Pangan dan Perkebunan

Tanaman pangan dan perkebunan menjadi 2 komoditas subsektor dari 4 prioritas kawasan pertanian yang ditetapkan oleh Kementan melalui Permentan No. 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Tanaman pangan adalah jenis tanaman dengan karbohidrat tinggi yang dijadikan sebagai makanan pokok seperti padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

Komoditas perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memerlukan media tanam dan ekosistem yang sesuai untuk membudidayakan suatu jenis tanaman dengan jumlah yang besar. Komoditas perkebunan terbagi menjadi beberapa jenis menurut produk yang dihasilkan ataupun kegunaannya tanaman tersebut, seperti tanaman penghasil minyak (*oil crop*), contohnya kelapa, kelapa sawit; tanaman penyegar (*beverage crop*), contohnya kopi, kakao, teh; tanaman rempah (*spice crop*), contohnya lada, pala, kayu manis; serta tanaman pemanis (*sweetener crop*), contohnya tebu (Wachjar, 2015).

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mendefinisikan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Wachjar (2015) menjelaskan perkebunan dan pengelolaannya dapat dibagi menjadi perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat, yaitu suatu usaha budidaya tanaman



perkebunan yang dilakukan oleh rakyat/pekebun yang hasilnya sebagian besar untuk dijual dengan area pengusahaannya dalam skala luas yang terbatas.

2.5. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut (Tarigan, 2005). Teori berbasis ekspor menerangkan bahwa beberapa aktivitas di suatu daerah adalah basis dalam arti bahwa pertumbuhannya menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas lain (non basis) merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh daerah tersebut (Soepono, 2001).

Pendekatan teori basis ini merujuk pada gagasan bahwa aktivitas ekspor berperan sebagai mesin pendorong pertumbuhan wilayah. Kecepatan perkembangan wilayah dinyatakan oleh performa daerah dalam mengirimkan barang dan layanan lokalnya ke wilayah lain, termasuk luar negeri. Sektor basis mengacu pada sektor yang mampu menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi permintaan baik di dalam maupun di luar wilayah perekonomiannya. Sementara itu, sektor non basis adalah sektor yang hanya mampu memasok produk dan layanan hanya untuk kebutuhan lokal. Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah, prioritas utama harus diberikan pada pengembangan sektor basis wilayah.

Kinerja dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditentukan dalam beberapa pengukuran yaitu: 1) pertama, penentuan sektor basis dan non basis ekonomi suatu wilayah dapat ditentukan dengan analisis *Location Quotient* (LQ). LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan dengan cara membanding perannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional (Emilia dan Imelia, 2006); 2) kedua, analisis *shift share* yang digunakan untuk menentukan perkembangan ekonomi suatu wilayah dalam konteks yang

ar dari wilayah tersebut.



2.5.1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

LQ merupakan suatu perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama secara nasional atau perbandingan terhadap suatu daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar (Tarigan, 2014). Analisis LQ adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis dan non basis dalam rangka memahami sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan suatu wilayah. Sektor yang dianggap basis ($LQ > 1$) dan non basis ($LQ < 1$).

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt}$$

Keterangan :

vi = Jumlah produksi pada sektor i di kecamatan

vt = Jumlah total produksi di kecamatan

Vi = Jumlah produksi pada sektor i di kabupaten

Vt = Jumlah total produksi di kabupaten

2.5.2. Analisis *Shift Share*

Salah satu alat untuk mengukur produktivitas daerah adalah metode analisis *shift share* (Arsyad, 1999). Analisis *shift share* digunakan untuk membagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah ke dalam tiga komponen dan mengukur kontribusi dari masing-masing komponen tersebut (Curtis, 1972). Pribadi dan Nurbiyanto (2021) menyatakan *shift share* suatu daerah kabupaten/kota dapat diketahui dengan membandingkan laju pertumbuhan ekonomi suatu kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah, terdapat 4 komponen dalam analisis *shift share* dalam membandingkan laju pertumbuhan ekonomi daerah:

1. Pertumbuhan Nasional (PN), melibatkan analisis pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi melalui evaluasi perubahan dalam produksi daerah yang dipicu oleh perubahan produksi dalam wilayah pembanding, dengan menganggap karakteristik ekonomi antar sektor dan wilayah tetap konsisten.
2. Pertumbuhan Proporsional (PP), diukur dari perkembangan aktivitas ekonomi suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (Page dan Patton, 1991).
3. Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW), diperhitungkan dari tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu yang dibandingkan dengan



nbangan wilayah lainnya.

eran Bersih (PB), menilai pertumbuhan ekonomi dalam suatu sektor di
 ah dengan memperhatikan perubahan bersih (*net shift*) sektor tersebut

dalam wilayah tersebut. Komponen PP dan PPW dijumlahkan untuk menghitung nilai ini.

2.6. Teori Lokasi Industri

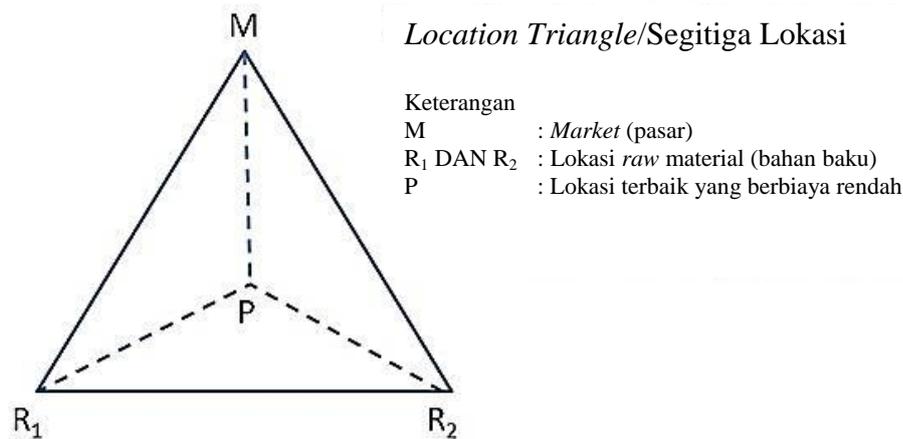
Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Tujuan dari mempelajari teori lokasi adalah melihat kedekatan atau jauhnya satu kegiatan dengan kegiatan lain dan apa dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang berdekatan (berjauhan) tersebut (Tarigan, 2005).

Pemilihan lokasi industri ditentukan oleh total biaya transportasi dan tenaga kerja, yang keduanya harus diminimalkan. Memilih lokasi industri dengan biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimal sangat berhubungan dengan mencapai tingkat keuntungan yang maksimal. Weber (1929) menyatakan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi industri, yaitu biaya transportasi, tingkat upah tenaga kerja, dan dampak dari kumpulan industri atau pembagian industri yaitu aglomerasi atau deaglomerasi. Keterhubungan antara biaya transportasi dan bahan baku, seperti yang diterangkan oleh Weber melalui konsep segitiga lokasi, bertujuan untuk menemukan posisi yang paling optimal dengan jarak terpendek dari sumber bahan baku dan pasar. Hal ini didasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

1. Area yang dianalisis adalah wilayah yang terisolasi, memiliki iklim seragam, menunjukkan adanya pusat konsumen yang terkonsentrasi, serta memiliki situasi pasar yang bersifat kompetisi sempurna.
2. Sumber daya alam tertentu tersedia di seluruh wilayah (*ubiquitous*) dengan jumlah yang mencukupi.
3. Material lain seperti bahan bakar mineral dan bahan tambang tersedia dengan sporadis dan dapat diakses di beberapa lokasi terbatas.



a kerja tidak tersebar secara merata (*ubiquitous*) melainkan lebih ung berkumpul di sejumlah titik dengan tingkat mobilitas yang beragam.



Gambar 1 Segitiga lokasi
Sumber: Weber (1990) dalam Tarigan (2005)

Dimisalkan ada dua sumber bahan baku yang lokasinya berbeda, yaitu R₁ dan R₂, sedangkan pasar (M) berada pada arah lokasi yang juga berbeda, dengan demikian terdapat 3 arah lokasi yang berbeda sehingga dipilihlah lokasi optimum pada titik P untuk mendapatkan ongkos angkut termurah pada titik tengah pertemuan dari 3 arah tersebut.

2.7. *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

Dalam pengambilan keputusan terkadang terdapat berbagai kriteria yang memerlukan perhitungan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga muncullah solusi alternatif untuk mengambil satu keputusan dari beberapa kriteria yang ada menggunakan *multi-criteria decision making* yang akan menghasilkan solusi kompromi terhadap berbagai macam kriteria yang ada.

Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah metode yang digunakan untuk menghadapi situasi yang rumit dan tak terstruktur dengan membaginya menjadi komponen yang berurutan dalam struktur hierarkis. Pendekatan ini melibatkan pemberian penilaian subjektif tentang tingkat kepentingan relatif dari setiap variabel, serta menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas tertinggi dalam mempengaruhi hasil dalam situasi tersebut. Proses pengambilan keputusan pada intinya melibatkan pemilihan alternatif terbaik. Langkah awal terdiri dari kan masalah, menentukan pilihan yang mungkin, serta penilaian tas untuk variabel acak, termasuk nilai preferensi waktu dan tifikasian risiko. Walaupun alternatif yang dipertimbangkan dan



penilaian probabilitasnya bervariasi, batasan tetap diterapkan dalam bentuk kriteria tunggal untuk perbandingan.

Peralatan utama *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah memiliki sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hierarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya dan diatur menjadi suatu bentuk hierarki (Parhusip, 2019). Kursini (2007) menjelaskan pengambilan keputusan menggunakan metode *Analysis Hierarchy Process* (AHP) memiliki prosedur atau langkah langkah yang perlu dilakukan yaitu:

1. Mengidentifikasi masalah dan merinci solusi yang diharapkan, kemudian menyusun struktur hierarkis dari tantangan yang dihadapi.
2. Menetapkan tingkat prioritas elemen melalui metode berikut:
 - a. Membandingkan elemen-elemen secara berpasangan untuk menentukan prioritas.
 - b. Mengisi matriks perbandingan dengan angka yang mencerminkan tingkat pentingnya satu elemen terhadap elemen lainnya.
3. Sintesis, melibatkan penggabungan pertimbangan dari perbandingan berpasangan untuk mendapatkan prioritas keseluruhan.
4. Evaluasi tingkat konsistensi, jika nilai yang diperoleh melebihi 10%, perlu dilakukan perbaikan pada penilaian data. Namun, jika rasio konsistensi kurang dari atau sama dengan 0,1, hasil yang dihasilkan dapat dianggap valid.

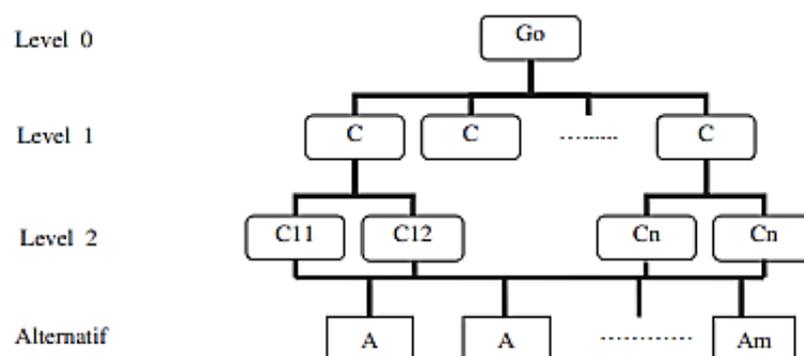
Saaty (1993) menjelaskan terdapat 6 prosedur dalam tahapan AHP, sebagai berikut:

1. Tahap dekomposisi masalah melibatkan penguraian tujuan yang telah ditetapkan menjadi struktur yang lebih teratur, membentuk rangkaian sistem, hingga mencapai tujuan tersebut dengan cara yang rasional. Dengan kata lain, tujuan utuh dipecah menjadi unsur-unsur yang membentuknya.
2. Penilaian atau pemberian bobot dilakukan untuk membandingkan elemen-elemen setelah proses dekomposisi selesai dan hierarki telah dirangkai dengan

Kemudian, dilakukan penilaian perbandingan berpasangan (pemberian) pada setiap bagian hierarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya.



3. Setelah selesai memberikan bobot atau mengisi kuesioner, langkah berikutnya adalah menyusun matriks perbandingan berpasangan untuk meratakan bobot tingkat kepentingan pada tiap elemen dalam hierarki masing-masing. Langkah ini dapat dikerjakan secara manual atau dengan menggunakan perangkat lunak komputer seperti *Expert Choice*.
4. Penetapan prioritas dijalankan dalam setiap bagian hierarki. Perbandingan berpasangan dilakukan pada setiap kriteria dan alternatif. Perbandingan nilai-nilai relatif kemudian diproses untuk menetapkan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Kriteria, baik yang kualitatif maupun kuantitatif, bisa dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung melalui manipulasi matriks atau pemecahan persamaan matematika.
5. Sintesis prioritas diperoleh dari hasil perkalian prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria yang lebih tinggi dalam hierarki, dan hasilnya dijumlahkan ke masing-masing elemen dalam tingkat yang terpengaruh oleh kriteria tersebut. Hasil akhirnya adalah kombinasi atau yang lebih dikenal sebagai prioritas global, yang kemudian digunakan untuk memberikan bobot prioritas lokal pada elemen-elemen pada tingkat terendah dalam hierarki sesuai dengan kriteria mereka.
6. Proses pengambilan keputusan melibatkan pemilihan alternatif-alternatif yang telah dibuat berdasarkan kriteria yang paling baik.



Gambar 2 Model struktur AHP 2 level dengan N kriteria dan M alternatif.

Sumber: Saaty (1993)



Untuk menentukan bobot dari setiap kriteria, AHP menggunakan perbandingan berpasangan dengan skala 1 hingga 9, dengan arti sebagai berikut; 1

= sama penting; 3 = sedikit lebih penting; 5 = cukup lebih penting; 7 = jauh lebih penting; 9 = mutlak lebih penting; dan 2, 4, 6, dan 8 mengindikasikan kompromi atau area abu-abu dalam penilaian.

Tabel 3 Kuesioner perbandingan berpasangan

	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C1			×														C2

Sumber: Saaty (1993)

Artinya: kriteria C1 jauh lebih penting daripada C2. Jika terdapat n kriteria maka akan terdapat $\frac{n(n-1)}{2}$ perbandingan berpasangan.

Dalam AHP, kriteria yang bersifat kualitatif dapat menghadapi risiko ketidakkonsistenan dalam penilaian perbandingan antara kriteria-kriteria tersebut. Salah satu metode pengukuran konsistensi yang digunakan oleh Saaty melibatkan penggunaan indeks konsistensi (*Consistency Index/CI*), yang dilakukan dengan langkah-langkah berikut.

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

Dengan menggunakan notasi n untuk merepresentasikan jumlah kriteria atau alternatif yang sedang dibandingkan, serta menggunakan λ_{max} untuk menunjukkan nilai *eigen* terbesar dari matriks perbandingan berpasangan dengan ukuran n . Jika nilai CI adalah 0, maka evaluasi keputusan dikatakan sepenuhnya konsisten, dimana nilai λ_{max} setara dengan jumlah kriteria yang sedang dibandingkan, yakni n . Ketika nilai CI semakin meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketidakkonsistenan dalam perbandingan keputusan semakin tinggi. Rasio konsistensi (*CR/Consistency Ratio*) dihitung dengan membandingkan *Consistency Index (CI)* dan *Random Index (RI)*, dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Apabila nilai CR melebihi 0,1, maka perlu untuk mengkaji kembali penilaian yang diberikan oleh responden (Saaty, 1993).



2.8. Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru 2011-2031 (Pertanian, Perkebunan dan Industri)

Review RTRW Kabupaten Barru 2011-2031 terkhusus sektor pertanian perkebunan dan industri dilakukan untuk memahami rencana pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam pengembangan wilayahnya.

1. Strategi Penataan Ruang

- a. Strategi untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan, meliputi:
 - 1) Konservasi dan pemeliharaan areal pertanian lahan sawah irigasi yang sudah ada.
 - 2) Peningkatan kualitas lahan pertanian secara keseluruhan.
 - 3) Selektif mengembangkan areal lahan untuk komoditas perkebunan, terutama di daerah pedesaan.
- b. Strategi untuk mengembangkan potensi industri, meliputi:
 - 1) Pertumbuhan kawasan industri skala besar dan menengah di PKW dan PKLp.
 - 2) Pengembangan sektor agroindustri yang berfokus pada komoditas dari bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
 - 3) Pertumbuhan kawasan agroindustri berukuran menengah di PKLp.
 - 4) Pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman.
- c. Strategi untuk mengembangkan potensi perdagangan adalah dengan memperluas pasar untuk hasil industri pertanian.
- d. Strategi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melibatkan peningkatan kemampuan, kapasitas, dan integritas melalui pendidikan formal dan informal bagi individu yang beroperasi di berbagai sektor yaitu kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, industri, pertambangan, perdagangan, permukiman, fasilitas infrastruktur, serta manajemen pemerintahan.



Pusat Kegiatan

at Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), terdiri dari:

- 1) PKLp Palanro di Kecamatan Mallusetasi yang merupakan kawasan agropolitan (pertanian, perikanan, dan peternakan sapi), kawasan minapolitan serta kawasan wisata alam.
 - 2) PKLp Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja yang merupakan kawasan pendidikan dan kawasan agropolitan (pertanian, peternakan dan perikanan).
 - 3) PKLp Ralla di Kecamatan Tanete Riaja yang merupakan kawasan agropolitan (pertanian, perikanan air tawar, perkebunan, hasil hutan dan peternakan sapi) dan wisata alam.
 - 4) PKLp Takkalasi di Kecamatan Balusu yang merupakan kawasan agropolitan (pertanian, perkebunan dan peternakan sapi).
 - 5) PKLp Pekkae di Kecamatan Tanete Rilau yang merupakan kawasan agropolitan (pertanian, peternakan dan perkebunan) dan kawasan minapolitan.
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), terletak di kawasan perkotaan Doi-Doi, Kecamatan Pujananting. Kawasan ini memiliki dua fokus utama, yaitu sektor pertambangan dan sektor agropolitan yang mencakup pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
3. Kawasan Peruntukan Pertanian
- a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mencakup dua bagian, yaitu:
 - 1) Pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas sekitar 14.527,07 Ha yang terletak di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.
 - 2) Pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luasan kurang lebih 12.781,73 Ha yang terletak di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah



Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

b. Kawasan peruntukan perkebunan terdiri dari:

- 1) Perkebunan kelapa dalam dan *hybrida* dengan luasan kurang lebih 2.202 Ha terletak di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.
- 2) Perkebunan kopi dengan luasan kurang lebih 758 Ha terletak di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.
- 3) Perkebunan jambu mete dengan luasan kurang lebih 5.278 Ha terletak di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.
- 4) Perkebunan cengkeh dan kakao dengan luasan kurang lebih 1.100 Ha terletak di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.
- 5) Perkebunan kemiri dan karet dengan luasan kurang lebih 4.617 Ha terletak di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng



Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

- c. Luas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Barru mencapai sekitar 11.488 Ha dan ditetapkan sebagai kawasan pertanian yang berkelanjutan.
 4. Kawasan Peruntukan Industri, kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di kawasan perkotaan PKLp (kawasan agropolitan) dan PPK (kawasan agropolitan).
 5. Kawasan Strategis yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi mencakup:
 - a. Kawasan agropolitan untuk komoditas pertanian dan perkebunan di Kecamatan Barru.
 - b. Kawasan agropolitan untuk komoditas pertanian di Kecamatan Pujananting.
- Ringkasan potensi lahan pertanian yang dimiliki oleh tiap Kecamatan menurut RTRW Kabupaten Barru 2011-2031 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Potensi lahan pertanian Kabupaten Barru menurut RTRW

No	Potensi Lahan Pertanian	Kecamatan						
		Tanete Riaja	Pujananting	Tanete Rilau	Barru	Soppeng Riaja	Balusu	Mallusetasi
1	Kawasan strategis		✓		✓			
2	PPLp	✓		✓	✓	✓	✓	✓
3	PPK		✓					
4	Pertanian lahan basah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Pertanian lahan kering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Kelapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Kopi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Jambu mete	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Cengkeh dan kakao	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Kemiri dan karet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: RTRW Kabupaten Barru, 2011-2031

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua PKLp dan PPK Kabupaten Barru merupakan kawasan penghasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan, dengan Kecamatan Barru sebagai kawasan strategis untuk pengembangan agropolitan pertanian serta perkebunan dan Kecamatan Pujananting untuk pertanian. Kawasan pertanian pangan peruntukan agroindustri pertanian berada diseluruh PKLp dan PPK Kabupaten Barru sedangkan untuk agroindustri perkebunan berada di 3 PKLp dan PPK Kabupaten Barru yaitu PKLp Ralla; PKLp Takkalasi dan PKLp Pakkae.



2.9. Visi Misi Kabupaten Barru

Visi pembangunan daerah Kabupaten Barru pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 adalah **“Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”**. Rumusan visi Kabupaten Barru mengandung empat kata kunci yakni sejahtera, mandiri, berkeadilan dan bernafaskan keagamaan yang masing masing memiliki arti yaitu:

1. Sejahtera, kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomi maupun sosial.
2. Mandiri, kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Barru.
3. Berkeadilan, kondisi ideal dimana dampak pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang.
4. Bernafaskan keagamaan, kondisi ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan.

Pernyataan misi merupakan penjabaran dari visi RPJMD Kabupaten Barru tahun 2021-2026, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal.
4. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan.



judkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean gance*) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi;

7. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Misi pembangunan Kabupaten Barru pada poin keempat memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu peningkatan ekonomi daerah berwawasan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan. Ringkasan penjabaran tujuan, sasaran dan strategi dari misi keempat Kabupaten Barru dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Keterkaitan misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten Barru

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 4: Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.		
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.	Meningkatnya sektor-sektor strategis perekonomian daerah. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu.	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi di sektor-sektor strategis. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon.

Sumber: RPJMD Kabupaten Barru, 2021-2026

Dari penjabaran Tabel 5 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Barru adalah memajukan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui pengembangan kawasan strategis dengan pemaksimalan sumber daya alam yang ramah lingkungan.

2.10. Studi Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan terdiri atas:



Tabel 6 Studi penelitian terdahulu

No	Judul dan Sumber Skripsi/Jurnal	Variabel Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Judul: Pengembangan Sentra Industri Berbasis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian di Kabupaten Bone (Susilawati, 2016)</p> <p>Sumber: Skripsi Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat basis komoditas, tingkat daya saing, tingkat pertumbuhan, dan tingkat progresivitas. 2. Ketersediaan bahan baku, aksesibilitas, infrastruktur, prasarana angkutan, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan lahan, kelembagaan dan kemiringan lereng. 3. Jumlah produksi, hasil analisis LQ dan <i>shift share</i>, aksesibilitas, moda angkutan, jumlah kecamatan pendukung, dan persentase kesesuaian sentra industri sektor unggulan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi potensi komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten Bone. 2. Menilai kesesuaian sentra industri untuk pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten Bone. 3. Menentukan lokasi prioritas untuk pengembangan sentra industri berdasarkan komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten Bone. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis <i>Location Quotient (LQ)</i>, analisis <i>shift share</i>, dan analisis komparatif hasil analisis LQ dan <i>shift share</i>. 2. <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i> menggunakan <i>software Expert Choice, Spatial Multi-Criteria Analysis (SMCA)</i> dengan pendekatan GIS dan <i>Software ILWIS</i> indikator. 3. Analisis skoring berdasarkan tingkat kepentingan dan analisis deskriptif. 	<p>Lokasi prioritas pengembangan sentra industri untuk komoditas unggulan sektor pertanian Kabupaten Bone adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komoditas padi di Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Barebbo dan Kecamatan Dua Boccoe. 2. Komoditas jagung di Kecamatan Amali. 3. Komoditas kedelai di Kecamatan Cina dan Kecamatan Libureng. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan penelitian. 2. Variabel untuk menentukan komoditas unggulan kabupaten. 3. Variabel untuk menentukan lokasi prioritas sentra industri komoditas unggulan kabupaten. 4. Metode penelitian untuk menentukan komoditas unggulan kabupaten dan menilai kesesuaian lokasi sentra industri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian tidak berfokus hanya pada pertanian tanaman pangan namun juga pada perkebunan. 2. Penambahan variabel penentu lokasi industri yaitu jenis tanah, kerawanan bencana dan aglomerasi serta penggabungan variabel infrastruktur dan prasarana angkutan menjadi sarana dan prasarana pendukung. 3. Metode penelitian untuk menentukan lokasi prioritas sentra industri menggunakan analisis deskriptif dan tidak menggunakan analisis skoring.



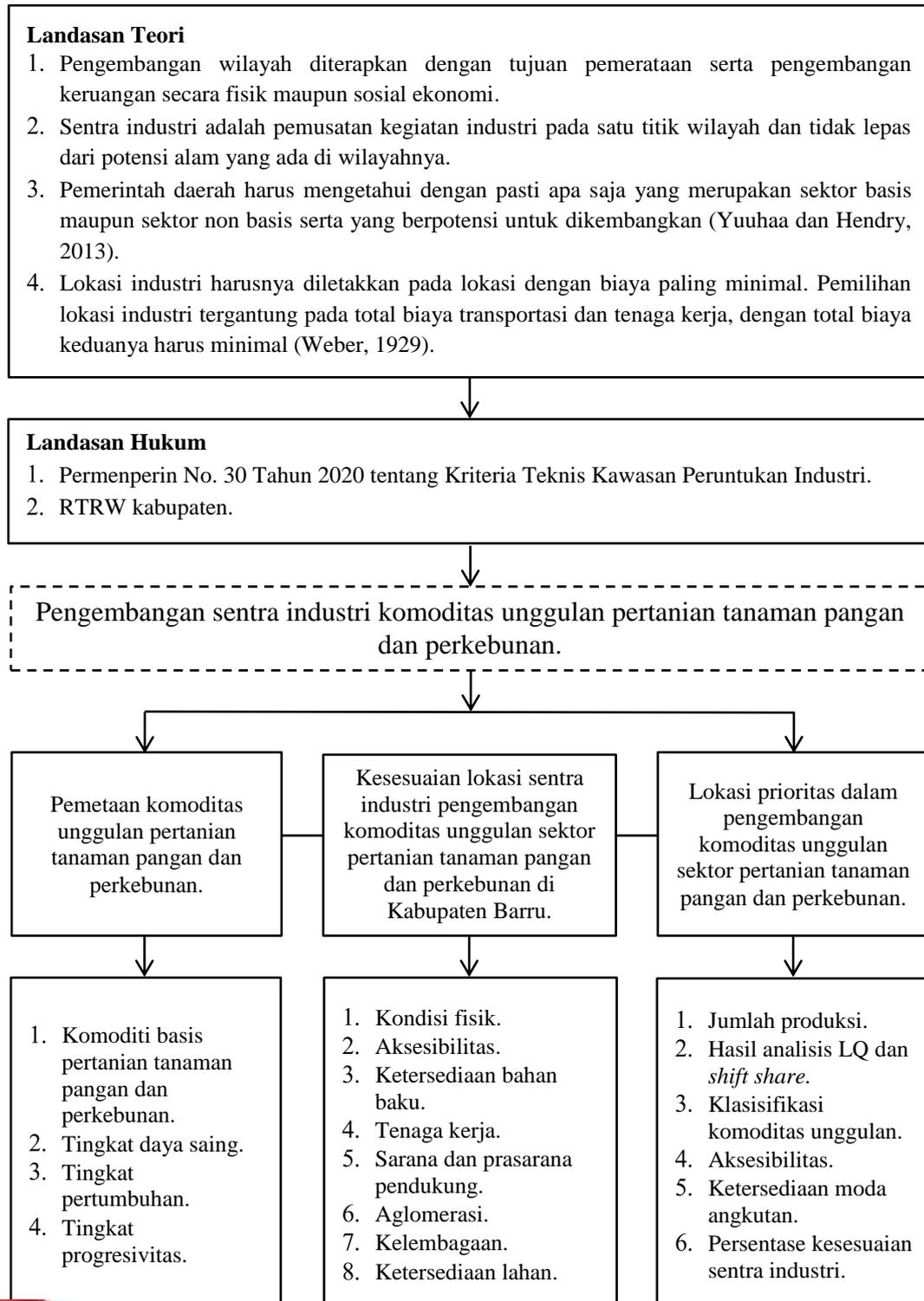
No	Judul dan Sumber Skripsi/Jurnal	Variabel Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
2	<p>Judul: Pengembangan Komoditas Unggulan di Wilayah Pengembangan Tumpang Kabupaten Malang (Shinta Widyaning Cipta, Santun R.P. Sitorus Dan Djuara P. Lubis, 2017)</p> <p>Sumber: Jurnal Kawistra, 7(2), 121-133</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi dan luas panen, harga produk pertanian, konsumsi bahan pertanian, sarana dan prasarana pertanian. 2. Kondisi kelerengan, jenis tanah, curah hujan wilayah. 3. Peta administrasi, RTRW dan <i>land use</i> wilayah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi komoditas unggulan. 2. Menganalisis hierarki wilayah. 3. Menganalisis lahan yang berpotensi untuk pengembangan komoditas unggulan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Location Quotient (LQ)</i>, <i>shift share</i> analisis rata-rata panen. 2. Analisis skalogram. 3. Analisis kesesuaian dan ketersediaan lahan. 4. <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i> – TOPSIS A'WOT. 	<p>Arahan pengembangan komoditas unggulan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komoditas unggulan apel di Kecamatan Poncokusumo seluas 682 Ha dan komoditas kubis seluas 3.539 Ha. 2. Komoditas unggulan sawi dan jagung di Kecamatan Wajak seluas 877 Ha dan 393 Ha. 3. Komoditas unggulan padi di Kecamatan Tumpang seluas 1.516 Ha dan komoditas sawi seluas 10 Ha. 4. Komoditas unggulan sawi di Kecamatan Jabung seluas 3 Ha dan komoditas padi seluas 1.312 Ha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel penentu kesesuaian lokasi menggunakan kondisi kelerengan dan jenis tanah wilayah. 2. Pengidentifikasian komoditas unggulan pada tujuan penelitian. 3. Metode penelitian menggunakan analisis LQ dan <i>shift share</i> serta AHP untuk menentukan lahan potensial untuk pengembangan komoditas unggulan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel yang digunakan bukan untuk penentuan lokasi sentra industri. 2. Tidak menggunakan analisis skalogram untuk menentukan hierarki wilayah pada tujuan penelitian. 3. Analisis yang digunakan dalam menentukan kesesuaian dan ketersediaan lahan. 4. Tidak menggunakan analisis <i>Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE)</i>.



No	Judul dan Sumber Skripsi/Jurnal	Variabel Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
3	<p>Judul: Penentuan Wilayah Sentra Industri Komoditas Unggulan Kabupaten Seram Bagian Timur (Nini Apriani, 2021)</p> <p>Sumber: Jurnal Karajata <i>Engineering</i>, 1(2), 58-65.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bahan baku. 2. Aksesibilitas. 3. Infrastruktur. 4. Ketersediaan tenaga kerja. 5. Prasarana angkutan. 6. Ketersediaan lahan. 7. Kelembagaan. 8. Kemiringan lereng (topografi). 	Menentukan lokasi sentra industri bagi komoditas unggulan di Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama petani dan nelayan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan bobot masing masing kriteria dengan <i>Analysis Hierarki Process (AHP)</i>. 2. Analisis <i>Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE)</i>. 	Kecamatan yang sangat berpotensi untuk menjadi sentra industri komoditas unggulan pertanian dan perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Werinama, Bula, Seram Timur dan Gorom. Ke empat wilayah ini memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan lokasi sentra industri komoditas unggulan pada tujuan penelitian. 2. Menggunakan analisis AHP dan Analisis <i>Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE)</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian tidak berfokus di sektor pertanian dan perikanan tapi di pertanian tanaman pangan dan perkebunan. 2. Penambahan variabel penentu lokasi industri yaitu jenis tanah, kerawanan bencana dan aglomerasi serta penggabungan variabel infrastruktur dan prasarana angkutan menjadi sarana dan prasarana pendukung. 3. Tidak terdapat analisis LQ dan <i>shift share</i> dalam penentuan komoditas unggulan.



2.11. Kerangka Konsep



Gambar 3 Kerangka konsep

